



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI,
KOMUNIKASI DAN JARINGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN
JAWA POS MEDIA TELEVISI (JTV)
NOMOR : PKS.12/BPIP/D.I/07/2022
NOMOR : 017/PKS/JTV/VI/2022
TENTANG
AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI SIARAN PUBLIK

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prakoso, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Rina Prabawati, Direktur PT. Jawapos Media Televisi (JTV) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama JTV, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 88, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila diperlukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak baik lembaga pemerintahan maupun nonpemerintahan;
- b. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan pembinaan ideologi Pancasila; dan
- c. bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyiaran dan pemrograman televisi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama berdasarkan asas saling membantu, saling mendukung, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan program aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui siaran publik.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. dialog interaktif/*talkshow* terkait partisipasi masyarakat dalam pembumih Pancasila dengan melibatkan Forum Jejaring Panca Mandala Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur;
- b. sosialisasi terkait Pancasila melalui penyiaran publik yang dikemas dalam *filler-filler*, program Pancasila untuk generasi milenial, siaran luar negeri tentang konten Pancasila dan program lainnya;

- c. siaran langsung peringatan Hari Lahir Pancasila dan peringatan hari-hari besar nasional lainnya;
- d. pembudayaan nilai-nilai Pancasila dan pelestarian kearifan lokal melalui program siaran budaya dengan konten cerita rakyat dan desa berdikari maupun kegiatan lainnya yang disepakati bersama; dan
- e. tukar menukar informasi, penggunaan ketokohan, dan kegiatan lain yang dipandang perlu dan strategis dalam membumikan Pancasila melalui program siaran JTV.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyiapkan narasumber untuk dialog interaktif/*talkshow* secara berkala bersama PIHAK KEDUA;
 - b. mengusulkan jadwal pelaksanaan dialog interaktif/*talkshow* kepada PIHAK KEDUA;
 - c. menyiapkan narasumber dalam pelaksanaan dialog interaktif/*talkshow* dalam memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni dan peringatan hari besar nasional lainnya; dan
 - d. memberikan usulan program siaran budaya dengan konten cerita rakyat dan desa berdikari sebagai bagian pembudayaan nilai-nilai Pancasila kepada PIHAK KEDUA; dan
 - e. menyiapkan materi-materi sosialisasi terkait Pancasila yang akan dikemas dalam *filler-filler*, program Pancasila untuk generasi milenial, siaran luar negeri mengenai konten Pancasila dan program lainnya.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menerima data narasumber dialog interaktif/*talkshow* dari PIHAK KESATU;
 - b. menyiapkan jadwal dialog interaktif/*talkshow* secara berkala sesuai usulan PIHAK KESATU;
 - c. sosialisasi terkait Pancasila melalui penyiaran publik yang dikemas dalam *filler-filler*, program Pancasila untuk generasi milenial, siaran luar negeri tentang konten Pancasila, dan program lainnya;

- d. menyiapkan kegiatan berupa siaran langsung peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni dan peringatan hari besar nasional lainnya;
 - e. menyiapkan program siaran budaya, konten cerita rakyat, dan desa berdikari sebagai bagian pembudayaan nilai-nilai Pancasila berdasarkan usulan PIHAK KESATU; dan
 - f. menerima materi-materi sosialisasi terkait Pancasila yang akan dikemas dalam *filler-filler*, program Pancasila untuk generasi milenial, siaran luar negeri mengenai konten Pancasila, dan program lainnya.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. berkoordinasi dalam menyiapkan tema dan materi dalam setiap pelaksanaan dialog interaktif/*talkshow*; dan
 - b. membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan kepada pimpinan PARA PIHAK.

Pasal 4

PROGRAM DAN KEGIATAN

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama menyusun program dan kegiatan selama jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun dalam kerangka acuan kerja sebagai pedoman pelaksanaan bagi PARA PIHAK.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang atau diakhiri, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirnya aktivitas-aktivitas yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran para PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, 10110
Telepon : (021) 3505200
Email : persuratan@bpip.go.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Ahmad Mashudi
Jabatan : Manager Hubungan Pemerintahan
Alamat : PT. Jawapos Media Televisi, Gedung JTV Lantai 1

Komplek Graha Pena, Jalan Ahmad Yani 88, Kota
Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Telepon : 031-8202173, 0813-3051-0060

Email : hudiahmad@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan penggantian pejabat memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah penggantian pejabat penghubung.
- (3) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab kegiatan.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh Keadaan Kahar yang merupakan hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK..
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan, pemogokan umum, kebakaran, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, keadaan keamanan yang tidak mengizinkan (peperangan, kerusuhan/huru-hara, penjarahan, blokade, dan revolusi), dan/atau perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana disebutkan pada ayat (2), PIHAK yang terkena akibat dari keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana disebutkan pada ayat (2), dapat dipertimbangkan untuk dilakukan perubahan tempat dan

waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan
PARA PIHAK.

Pasal 10

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- (1) Monitoring dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam bentuk Laporan Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama yang paling sedikit memuat tentang:
 - a. pendahuluan;
 - b. sasaran;
 - c. tujuan;
 - d. keluaran/hasil yang dicapai;
 - e. lokasi pelaksanaan dan kelompok penerima manfaat;
 - f. peran para pihak;
 - g. pembiayaan; dan
 - h. evaluasi/penyelesaian masalah.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan segala perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



PRAKOSO

PIHAK KEDUA,

A blue ink signature of RINA PRABAWATI, consisting of a stylized, cursive script.

RINA PRABAWATI